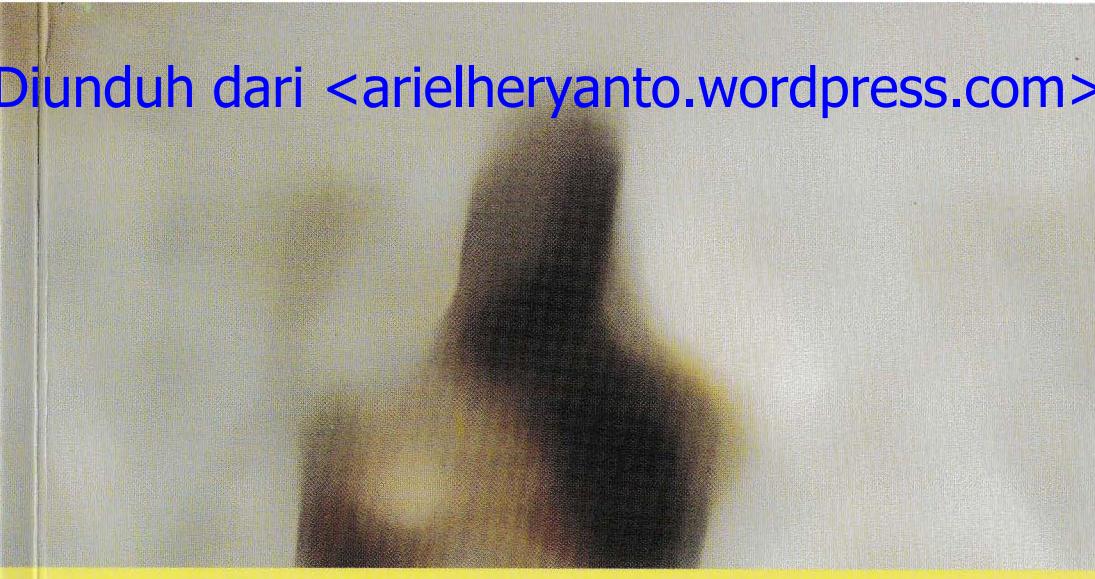


Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



## KETIKA SENSOR TAK MATI-MATI

Penyunting: Ignatius Haryanto

EDITOR: Ari

Hivos: Desanto

Hari Amri

## KETIKA SENSOR TAK MATI-MATI

Hak cipta tulisan ada pada masing-masing penulis  
ISBN 978-979-16888-2-6

Cetakan Pertama: Desember 2007

PENYUNTING Ignatius Haryanto  
EDITOR NASKAH Eko Endarmoko  
DESAIN KULIT MUKA Ari Prameswari

PENERBIT  
Yayasan Kalam  
Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta 13120  
Tel. 021 8573388, pesawat 144-147  
e-mail: editor@jurnalkalam.org

Buku ini diterbitkan atas kerja sama dengan Hivos

## Daftar Isi

### IGNATIUS HARYANTO

Sensor di Indonesia pada Zaman  
yang (Tidak?) Berubah: Pengantar 1

DAVID T. HILL dan KRISHNA SEN  
Internet dan Perlawanannya terhadap Orde Baru 18

SATRIO ARISMUNANDAR  
Dari "Bakso Tikus" Hingga "Goyang Ngebor":  
Sensor terhadap Televisi Swasta di Era Pasca-Soeharto 92

VERONICA KUSUMA dan IGNATIUS HARYANTO  
Sensor Film di Indonesia 104

WULAN DIRGANTORO  
Pasang Surut Sensor dan Dunia Seni Indonesia 137

ARIEL HERYANTO  
Ketika Komunisme Tak Pernah Mati:  
Kekerasan, Trauma, dan Narasi di Indonesia 152

Tentang Penulis dan Penerjemah 195

## Ketika Komunisme Tak Pernah Mati

Kekerasan, Trauma, dan Narasi di Indonesia\*

SEJAK istilah “globalisasi” menimbulkan banyak pembicaraan, istilah “Perang Dingin” makin lama makin ditinggalkan. Tampaknya ada persepsi umum bahwa Perang Dingin bukan hanya bagian dari masa lalu yang sudah mati, tapi juga merupakan fenomena yang sangat jelas. Tulisan ini menelaah cara kerja budaya dari politik Perang Dingin era 1990-an pada rezim otoriter antikomunis terakhir dan yang paling lama bertahan, yaitu Orde Baru di Indonesia (1965-1998). Implikasinya, tulisan ini mengemukakan apa yang akan terus mendominasi politik budaya era pasca-Perang Dingin dan era yang terglobalisasi.

Beberapa menit setelah pukul sembilan pagi pada 21 Mei 1998, Soeharto berhenti dari masa kepresidenan 32 tahun, menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang didukung Amerika Serikat. Rezim ini berkuasa di Indonesia lebih dari tiga dekade yang diwarnai kuatnya represi militer, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan maraknya terorisme budaya. Apa yang terjadi sesudah itu masih tidak jelas. Otoritarianisme mungkin saja muncul kembali di tahun-tahun mendatang, dengan nama, bentuk, personel, dan kelengkapan

baru. Namun, beberapa perubahan sejarah tak dapat dihindari, termasuk berakhirnya retorika “ancaman komunisme” yang selalu sukses dipakai, dan dimulainya pencarian yang luar biasa licin atas masa lalu berdarah yang melahirkan rezim Orde Baru. Serangkaian masalah baru akan menjadi tantangan berat bagi masyarakat Indonesia, bahkan dengan skenario yang paling optimistis sekalipun di mana larangan-larangan keras ala Orde Baru sudah dihapuskan. Lalu, bagaimana sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi trauma, kebungkaman, dan ingatan mengenai kekerasan politik yang selama tiga dekade tak terurai? Barangkali ada sebuah petunjuk dari analisis mengenai cara mereka bertahan dalam kesakitan selama 32 tahun terakhir.

Sangatlah menggoda untuk melihat sebuah rezim otoriter yang tangguh dalam arti statis atau total, di mana sebuah kelompok penguasa memegang kontrol penuh atas masyarakat dengan tangan besi, dan perilaku yang sistematis. Selain itu, mudah juga membayangkan akhir dari otoritarianisme sebagai penggulingan kekuasaan yang melibatkan ledakan energi, amarah, dan keinginan yang selama ini terpendam. Banyak pengamat yang berhasil menghindari godaan semacam itu.<sup>1</sup> Pada bagian-bagian berikut saya juga menguraikan

<sup>1</sup> Pemahaman Williams (1980: 37) mengenai “ideologi” dapat digunakan untuk banyak lagi relasi kekuasaan yang lain, termasuk yang berkenaan dengan diskusi kita mengenai otoritarianisme Orde Baru:

*For if (it) were merely some abstract, imposed set of notions, if our social and political and cultural ideas and assumptions and habits were merely the result of specific manipulation, of a kind of overt training which might be simply ended or withdrawn, then the society would be very much easier to move and to change than in practice it has ever been or is.*

(Adalah sebuah pendapat yang abstrak, dan dipaksakan, jika ide, asumsi, serta kebiasaan-kebiasaan sosial, politik dan budaya kita merupakan akibat dari manipulasi spesifik dan pelatihan nyata yang mungkin bisa begitu saja diakhiri atau ditarik sehingga masyarakat bisa dengan sangat mudah melangkah dan berubah dibandingkan dengan praktiknya.)

\* Versi awal tulisan ini pernah dimuat dalam *International Journal of Cultural Studies*, vol. 2, London: Sage Publications, 1999.

baik marana otoritarianisme, dan pasca-otoritarianisme menjelang milenium berikutnya, beroperasi dengan cara-cara yang lebih tersebar, lebih berbahaya, dan lebih kacau daripada biasanya.

Bahkan saat berada di puncak kekuasaannya, pola otoritarianisme Orde Baru sangat tidak efisien dan komprehensif. Rezim ini dipenuhi kontradiksi, anomali, ironi, dan kesalahpahaman antar-sesama. Namun, ini tidak menghalangi efektivitas otoritarianisme Orde Baru. Yang terjadi malah kebalikannya. Seseorang tidak bisa langsung menunjuk resistensi masyarakat sebagai penyebab ketidaksempurnaan rezim ini. Salah satu argumen dalam tulisan ini adalah bahwa di tengah ketidakberdayaan tersebut, masyarakat Indonesia bertahan dalam otoritarianisme Perang Dingin yang diperluas. Mereka sesekali melawan justru dengan terlibat dalam kegiatan yang merefleksikan kepatuhan luar biasa.

Konsep kepatuhan luar biasa yang dipengaruhi teori pasca-modernisme, menarik perhatian saya lewat karya Baudrillard dan Mbembe. Selain menunjukkan keunggulan konsep tersebut, di bagian kesimpulan tulisan ini saya akan mengujinya secara kritis, dan mengenali kelemahan konsep ini atas analisis mengenai kekerasan politik, serta kajian budaya dan sosial secara umum.

Sebagai bahan pembicaraan, ada beberapa premis yang harus disebutkan dari awal. Premis dasar saya adalah bahwa pembunuhan massal pada 1965-1966 merupakan fondasi otoritarianisme Orde Baru, yang hingga 1998 menikmati bantuan berlimpah dan perlindungan terus-menerus dari Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi liberal lainnya. Kekerasan tersebut menjadi kekuatan utama dalam pembentukan identitas subyek, fantasi, dan aktivitas sehari-hari dari negara berpenduduk paling banyak keempat di dunia ini selama tiga dekade terakhir. Dalam tingkatan yang berbeda, peristiwa itu barangkali juga terus menjadi faktor penentu selama dekade-dekade berikutnya.

Manakala teror, intimidasi, dan kekerasan masa lalu terus mem-

bayangi masa kini, semua hal itu tidak pernah terjadi tanpa mediasi dan komplikasi. Sebagian besar isi tulisan ini berfokus pada detail keseharian dari mediasi dan komplikasi ini. Saya kira generalisasi abstrak serta instrumentalisme (humanis, rasional, atau yang lain) tidak memadai untuk menganalisis berbagai praktik politik dan budaya yang bermasalah. Otoritarianisme juga tidak dapat dilihat sebagai sebuah sistem kekuasaan di mana agen-agen sosial yang berpengaruh bekerja secara bebas dan unilateral (misalnya dalam bentuk dominasi, represi, eksploitasi, atau menghasilkan kekerasan) terhadap pihak lain semata-mata demi memaksimalkan keuntungan diri mereka. Keterlibatan para korban itu selalu ada.

## **Pemaknaan hantu usang berkepanjangan**

Pada 18 Januari 1998, sebuah bom meledak di jantung ibu kota Jakarta saat kejatuhan mata uang rupiah mencapai puncaknya. Tidak ada yang menyatakan bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Ledakan itu sendiri sebetulnya relatif tidak berarti, dan kerusakan yang ditimbulkannya pun kecil. Yang lebih serius adalah makna politik yang dipandang sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Para pejabat tinggi pemerintah menuduh PRD (Partai Rakyat Demokrasi yang terlarang dan berhaluan kiri, bertanggung jawab atas insiden itu.<sup>2</sup> Target para pejabat itu sebenarnya bukan PRD, tapi Sofjan Wanandi, taipan keturunan Cina yang sampai sekarang masih menjadi sekutu Orde Baru. Ia dituduh membiayai aksi kriminal itu. Pucuk pimpinan PRD, umumnya aktivis muda berumur sekitar 30-an, sudah dipenjara. Sofjan Wanandi segera dipanggil dan diinterrogasi oleh Polda Metro Jaya. Fotonya muncul di halaman depan dan sampul muka media cetak besar selama berminggu-minggu sebagai tertuduh yang tidak meyakinkan.

<sup>2</sup> Saat itu sulit berbicara tentang “pemerintah” karena suara yang kurang seragam dan kebijakan yang tidak konsisten.

Banyak pengamat melihat keseluruhan peristiwa itu sebagai serangan terhadap Sofjan Wanandi, juga lembaga CSIS (Center for Strategic and International Studies) yang ia dirikan dan pimpin, serta sejumlah konglomerat Indonesia keturunan Cina yang diwakilinya. Tidak lama sebelum peristiwa ledakan tersebut, Sofjan Wanandi telah melakukan beberapa kesalahan politis. Ia tampak enggan mendukung penahbisan Habibie sebagai wakil presiden oleh Soeharto yang waktu itu akan dilangsungkan pada Maret 1998. Lebih jauh lagi, ia memperlihatkan penolakannya atas kampanye anak perempuan tertua presiden saat itu, sebagai usaha sia-sia untuk menyelamatkan nilai rupiah (dan kerajaan bisnisnya) yang terus jatuh. Sekelompok kecil orang yang mencurigakan berdemonstrasi di CSIS, menuntut Sofjan diseret ke meja hijau dan agar CSIS ditutup.<sup>3</sup>

Tak lama sesudah itu, kabar beredar bahwa ada persekongkolan orang Tionghoa di luar negeri yang menyebabkan kekacauan ekonomi Indonesia. Beberapa pejabat negara menunjuk taipan-taipan Cina—yang tidak disebutkan namanya secara jelas—sebagai pengkhianat. Kebetulan juga, menteri senior Singapura Lee Kuan Yew berkomentar mengenai situasi di Indonesia dan mengkritik penunjukan Soeharto atas Habibie. Komentar ini oleh pendukung Habibie di Jakarta dianggap mencampuri urusan dalam negeri, dan lebih buruk lagi, itulah bukti adanya persekongkolan Cina di luar negeri terhadap bangsa ini. Sebuah demonstrasi kecil lainnya digelar di depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, dan beberapa hari sesudahnya, meledaklah kerusuhan anti-Cina di seantero negeri.

Peristiwa ini dipaparkan untuk memperkenalkan empat isu terkait yang relevan dengan pembicaraan ini. Pertama, sampai beberapa

bulan menjelang akhir kekuasaannya, Orde Baru masih saja menanamkan momok antikomunis dan rasialisme warisan kolonial sebagai alat politik. Karena PRD telah lebih dulu dinyatakan sebagai “neo” komunis, Sofjan Wanandi jadi terkena stigmatisasi juga. Strategi ini terdengar tidak masuk akal bagi mereka yang tidak memahami keberhasilan masa lalu perburuan antikomunis yang menyuburkan rezim ini. Tindakan pemerintah tersebut menandakan kemandekan dan kebangkrutan ideologi.

Kedua, insiden tersebut memperlihatkan penggunaan isu antikomunis dari masa lalu menjadi kian pelik serta membutuhkan perantara dan referensi yang lebih banyak. Kini tak gampang menyatakan bahwa lawan baru itu jahat karena ia komunis yang masih bertahan dalam dunia pasca-Perang Dingin. Tuduhan kejahatan politik hanya bisa dihadirkan lewat serangkaian tautan dengan sesuatu yang secara hakiki jahat, yaitu komunisme. Akan saya berikan butir ini sebelum kita sampai pada soal ketiga dan keempat yang dapat dihubungkan dengan ledakan bom tadi.

Sekilas, tuduhan bahwa Sofjan Wanandi mendukung PRD tampak absurd. Keduanya secara politis tidak sejalan. Tapi substansi dari tuduhan itu sendiri tidak sepenting akibat yang ditimbulkannya. Menyudutkan Sofjan Wanandi semata-mata karena ke-Cina-annya tidak akan cukup kuat pada 1998 sehingga dibuatlah kaitan dengan PRD yang memang sudah terlarang. Supaya propaganda ini efektif, pemerintah harus bersandar pada propaganda lain yang sudah usang, namun dalam waktu yang lama terbukti ampuh.

Pertama-tama, pemerintah harus bergantung pada penerimaan publik atas propaganda terdahulu mengenai kejahatan bengis PRD, yaitu kepercayaan terhadap komunisme. Efektivitas stigmatisasi PRD kemudian bergantung pada keberhasilan pemerintah mempertahankan kesuksesan masa lalunya saat menghapuskan komunisme

<sup>3</sup> Ketika majalah berita *D&R* menerbitkan tajuk rencana yang kritis dan mempertanyakan asal-muasal demonstrasi tersebut, majalah ini pun mendapatkan demonstrasi sebagai balasannya.

secara umum dan membubarkan Partai Komunis Indonesia.<sup>4</sup>

Orde Baru harus bergantung pada asumsi-asumsi keji yang berlapis-lapis untuk membuat pernyataan politik kuat pada akhir 1990-an dan itu menunjukkan keruntuhannya secara ideologis, meski program-program politik dan ekonominya terus menguat sebelum krisis moneter 1997-1998. Kegagalan ini tidak terjadi dalam semalam. Saat bencana ini datang pada Mei 1998, tidak mudah bagi penguasa untuk menerimanya begitu saja.

Perburuan antikomunis oleh Orde Baru meliputi sejarah yang panjang dan penuh warna. Akan saya jelaskan bagian-bagian dari sejarah di mana peristiwa 1998 hanya merupakan ekses kecil. Tanpa melihat gambaran besar, peristiwa 1998 terdengar tidak masuk akal. Namun, sebelumnya saya ingin membahas dua lagi dari empat soal yang dimaknai oleh ledakan bom pada Januari 1998.

*Ketiga*, semakin jauh stigmatisasi komunis masa lalu dari masa kini, kaitan antara label “komunisme” terhadap apa pun yang dimaknainya atau rujukan tertentu semakin tidak stabil dan kabur. Pada 1990, label tersebut dapat mengacu pada apa pun dan siapa pun. Komunisme menjadi pemakna kosong yang mengambang, melenyapkan semua rujukan historis, layaknya perempuan seksi, mobil, atau celana jin di iklan-iklan era kapitalisme, seperti yang dikatakan oleh Roy Porter (1993: 2):

*Meaning is produced by endless, symbolic exchanges within a dominant code, whose rhetoric is entirely self-referential; a sexy woman is used to sell a car; a car sells cigarettes; cigarettes sell machismo; machismo is used to sell jeans; and so the symbolic magic circle is sealed.*

<sup>4</sup> Untuk detail yang lebih banyak lagi mengenai tuduhan terhadap kejahatan politik PRD dan hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia, lihat Heryanto 1997: 115-118.

(Makna dihasilkan melalui pergantian simbolis tanpa akhir dalam sebuah kode dominan di mana seluruh pernyataannya merujuk pada adanya sendiri; perempuan seksi digunakan untuk menjual mobil; mobil menjual rokok; rokok menjual kejantanan; kejantanan dipakai untuk menjual jin; sehingga lingkaran magis simbolis pun terkunci.

*Keempat*, berbeda dari iklan, wacana antikomunis memiliki dasar yang lebih permanen dan fundamental, berakar pada serangkaian peristiwa di bulan-bulan terakhir 1965. Peristiwa-peristiwa ini membentuk fondasi sejarah panjang otoritarianisme Perang Dingin di negara Asia Tenggara terbesar yang bertahan menjelang akhir abad ke-20. Ancaman komunis bagaimanapun juga bukanlah pemakna bebas dalam teka-teki pemaknaan. Perburuan antikomunis yang terlihat sewenang-wenang merupakan dosa asal yang harus kita lihat dan telaah lebih dekat.

## Penciptaan dosa asal

Otoritarianisme Orde Baru di Indonesia tidak akan muncul atau bertahan dengan baik tanpa daya magis hantu bernama “ancaman komunis”. Wacana hebat tersebut hanya dimungkinkan berkat pembunuhan massal yang keji pada 1965 atas sekitar satu juta orang selama kurang dari empat bulan. Perkiraan jumlah korban bervariasi. Bertrand Russell menggambarkan bahwa *in four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years* (“dalam empat bulan, jumlah orang yang tewas di Indonesia lima kali lebih banyak dari yang terjadi di Vietnam selama 12 tahun” (kulit muka Cadwell, 1975), atau 500 kali lipat jumlah korban dalam peristiwa di Lapangan Tiananmen, Beijing.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Media Barat memperkirakan jumlah korban tewas di Beijing antara 2.000 sampai 5.000 (*Far Eastern Economic Review*, 1989: 10).

Trauma masa lalu tersebut tidak begitu saja bertahan dan hadir di masa sekarang tanpa perubahan. Ia juga tidak begitu saja mengalami serangkaian perubahan terus-menerus. Beragam versi dari reproduksi “ancaman komunis” memiliki nyawanya sendiri, memisahkan diri makin lama makin jauh dari pembunuhan nyata yang merupakan dasar atau asal usulnya.

Trauma berkepanjangan dan otoritarianisme Orde Baru yang kuat telah saling mengisi dan saling memperbarui. Dalam situasi seperti itu, mereka yang lolos dari pembantaian 1965 dan masyarakat umum dapat mengharapkan perlindungan hanya dari jeda-jeda sementara dalam wacana hegemonis, ambiguitas, dan kesalahan yang tak disengaja. Bahkan di rumah, orangtua dan kakek-nenek menolak membahas bersama para sanak saudara apa yang mereka dengar atau lihat pada 1965 atau tak lama sesudahnya. Jelas hal tersebut bukan karena efektivitas sensor resmi atau takut pada pembalasan dendam. Tampaknya tidak ada wacana yang tersedia untuk menyusun dan mengisahkan masa lalu yang traumatis.

Pembunuhan massal 1965 tidak diakui secara umum sebagai satu-satunya asal usul Orde Baru di Indonesia. Berdasarkan sejarah resmi, pembunuhan tersebut merupakan respon dari “kudeta komunis 1965” yang menewaskan enam jenderal di Jakarta pada malam menjelang 1 Oktober 1965. Ironisnya, “kudeta komunis” melahirkan rezim militer Orde Baru yang heroik dan berjaya. Sejak saat itu, rezim ini mengklaim dirinya telah menyelamatkan bangsa dari kudeta yang gagal. Dalam penjelasan resmi, kudeta tersebut menandai lahirnya Orde Baru Indonesia, dan merupakan asal usul dari semua yang terjadi setelah itu. Kisah tersebut melahirkan naratornya sendiri, yang seolah-olah sekadar menjelaskan asal usul tersebut, bukan menciptakannya.

Sekarang kita mudah melihat semua itu secara terbalik. Orde Baru dapat dikatakan telah menciptakan narasi resmi sebagai otobiografinya, di mana “kudeta komunis” dan “ancaman komunis”

bukan bagian dari kisah tersebut.<sup>6</sup> Dan ini juga bukan semacam kasus penciptaan *ex-nihilo* dari khayalan semata. Lewat Baudrillard kita dapat melihat narasi Orde Baru sebagai simulasi, di mana *images precede the real to the extent that they invert the causal and logical order of the real and its reproduction* (“citra mendahului kenyataan sampai titik di mana ia membalikkan tata sebab akibat dan logika dari kenyataan dan reproduksinya”) (dikutip dalam Rojek 1997: 115). Pokok masalahnya di sini bukanlah bacaan atau tulisan mana yang paling mendekati kebenaran, tetapi bagaimana sebuah narasi atau *simulacra* berhasil membangkitkan efek begitu dahsyat dari sesuatu yang hampir tidak ada kaitannya dengan kebenaran sejarah yang ditampilkan atau menyembunyikan oleh narasi tersebut.<sup>7</sup>

Selama hampir tiga dekade, wacana “ancaman komunis” telah menjadi narasi utama, sebuah prinsip di mana *a potentially endless exegetical discourse can be generated* (“wacana alkitabiah yang dapat dibangkitkan terus-menerus”) (Clifford 1988: 86). Narasi utama ini mengukuhkan legitimasi rezim, dan fungsinya tak tergantikan dalam politik “stabilitas dan ketertiban” dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Dalam keseharian masyarakat Indonesia, narasi yang sama berperan penting dalam konstruksi dinamis dari identitas, hierarki sosial, dan relasi kekuasaan. Tentu saja narasi utama tersebut

<sup>6</sup> Para penulis yang kemudian terbukti menjadi narator utama adalah Nugroho Notosusanto (saat itu direktur Lembaga Sejarah di Departemen Pertahanan dan Keamanan) dan Ismail Saleh (saat itu dosen di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, 1968, 1989). Diangkat oleh Soeharto, keduanya menulis dalam bahasa Inggris(!) dan pada 1968 menerbitkan buku *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia*. Terjemahan dari buku itu baru terbit pada 1989, beberapa bulan sebelum berakhirnya Perang Dingin dan berakhirnya efektivitas momok antikomunis di Indonesia.

<sup>7</sup> Lihat Baudrillard (1983b, 1988) untuk lebih memahami konsep “*simulacra*” sebagai tanda-tanda yang mendahului kenyataan dan tidak menyembunyikan apa pun atau tiruan dari sesuatu yang tidak ada.

tidak membawa pengaruh yang sama dalam kurun 32 tahun di Indonesia.

## Rezim *simulacral*

Kesulitan dalam menetapkan kebenaran yang pasti atau padu mengenai peristiwa-peristiwa seputar pembantaian 1965 membawa kita pada konsekuensi tertentu. Terdapat ruang bagi kreativitas rezim maupun tekanan terus-menerus terhadap rezim itu untuk membangkitkan kembali “ancaman komunis” atau sebuah simulasi yang memiliki efek sama. Wacana kebangkitan ancaman komunis terpatri sangat dalam pada rezim Orde Baru, sehingga tidak ada rezim antikomunis lain setelah era Perang Dingin yang menghiraukan perlunya reproduksi besar-besaran terhadap ikon-ikon mutakhir, monumen, fiksi, peradilan dan *simulacra*. Semua artefak ini dipakai sebagai saksi ancaman berkepanjangan komunis yang tak pernah mati sekaligus untuk melanggengkan rezim Orde Baru.

Selain contoh-contoh kasus di bawah ini, daftar contoh narasi tersebut terlalu panjang dan tidak penting. Pada September 1994, pemerintah menerbitkan “buku putih” dengan klaim bahwa buku ini memberikan penjelasan yang benar dan menyeluruh mengenai periode bermasalah 1965/1966. Buku tersebut bukan “buku putih” pertama yang pernah diterbitkan rezim itu. Pada akhir 1997 Lembaga Ketahanan Nasional meluncurkan dua buku baru yang, menurut seorang pengamat yang punya otoritas (Magnis-Suseno, 1997), hampir tidak berisikan hal yang lebih baru dari versi resmi yang sudah beredar 30 tahun. Meski rencana menerbitkan buku putih itu sudah ada beberapa tahun sebelumnya, penerbitan buku tersebut pada 1994 tampaknya dipicu serangkaian tantangan terhadap sejarah resmi, seperti yang ditulis oleh Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi yang Berhak* (1994).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Beberapa tahun sesudahnya, di Indonesia menjamur terbitan—yang

Kurang lebih setahun sebelumnya, saat memperingati hari jadi berkuasanya Orde Baru dan matinya PKI, Presiden Soeharto meresmikan tampilan simulasi yang megah di Jakarta, dinamakan Museum Pengkhianatan PKI, dengan 37 diorama tiga dimensi yang menggambarkan “kekejaman komunis” tidak hanya saat kudeta 1965, tapi juga dalam serangkaian percobaan kudeta sejak 1945 (*Bernas* 1992a; *Jawa Pos* 1992; *Kompas* 1992a).<sup>9</sup> Di Madiun, sebuah monumen serupa juga diresmikan (*Kompas* 1992b).

Itu hanya sebagian dari maraknya festival simulasi yang dirancang pemerintah Orde Baru. Yang paling menonjol dari semuanya adalah narasi kinetik dalam bentuk film sepanjang empat setengah jam berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI*<sup>10</sup> yang diproduksi pada 1982-1983 oleh perusahaan film negara dan dirilis pada 1984. Dalam pemutaran awalnya di bioskop umum, pelajar seantero negeri diwajibkan membayar tiket dan menontonnya pada jam sekolah. Seterusnya, film tersebut diputar tiap tahun di stasiun televisi milik negara, dan semua stasiun TV swasta diwajibkan menayangkannya

---

segera dilarang—mengenai riwayat hidup tokoh politik tua dan senior yang pada awal 1990-an menyatakan sesuatu yang berlawanan mengenai sejumlah peristiwa yang sebagian besar kabur dan menyelimuti pergantian kekuasaan berdarah pada 1965. Salah satu buku demikian yang menimbulkan reaksi keras dari rezim dan pendukungnya ditulis oleh Oei Tjoe Tat (1995).

<sup>9</sup> Untuk menekankan kekejaman tiada akhir dari komunis, pernyataan resmi lainnya menunjuk pada 1926 sebagai usaha kudeta PKI yang paling awal (lihat misalnya Getal 1994). Ironisnya, ini juga menjadi bagian dari perlawanan nasionalis terhadap Belanda sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945.

<sup>10</sup> G30S/PKI adalah akronim standar dari Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. Film ini bukanlah film satu-satunya yang juga diproduksi pemerintah yang menggambarkan peristiwa-peristiwa seputar kudeta 1965 yang historis, namun merupakan proyek paling ambisius dan paling luas tersebut.

pada tanggal 30 September malam, dan tiap rumah serta kantor diharuskan memasang bendera setengah tiang pada hari itu.

Pada 1996, penayangan kembali film tersebut membawa makna yang lebih besar, seiring pengumuman resmi pemerintah mengenai kebangkitan komunis di tangan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebulan sebelumnya. Meski tuduhan itu tidak dipercaya publik, menteri pendidikan saat itu bersikukuh menjalankan propaganda tambahan. Setiap murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama setiap Senin pagi sepanjang bulan September diwajibkan menghadiri upacara di mana kepala sekolah membacakan teks standar mengenai kekejaman komunis. Untuk “tugas sekolah”, para murid diwajibkan mengumpulkan kliping artikel atau wawancara berisi hujatan terhadap komunis (*Forum Keadilan* 1996b: 28-29). Seluruh kegiatan tersebut ditutup dengan pemutaran film *Pengkhianatan G30S/PKI* di akhir bulan.

Jika semua usaha itu ada pada level wacana, hukuman sesekali tetap dijatuhkan untuk mempertahankan kredibilitas dan efektivitas propaganda.<sup>11</sup> Narasi “kudeta 1965” yang melibatkan hukuman, penyiksaan, dan teror terhadap kelompok tertentu diketahui secara luas, tapi mungkin tidak dimengerti oleh pelajar Indonesia. Dampak dari wacana politik atas reproduksi kekejaman politik dan relasi kekuasaan masih terus dipelajari.

Kampanye antikomunis yang luas dan agresif ini sering mengorbankan pihak nonkomunis dan antikomunis yang tidak bersalah.

<sup>11</sup> Mengenai ritual periodik dari disiplin dan hukuman yang diterapkan terhadap generasi pertama korban yang berhubungan dengan 1965, lihat Southwood dan Flanagan (1983). Mengenai pembahasan kasus yang lebih mutakhir pada 1990-an, di mana anak muda yang pada 1965 baru berusia tiga dan lima tahun dijadikan korban, lihat Heryanto (1994). Sepanjang 1995 dan 1996 muncul lagi perburuan antikomunis, tapi selalu mendapat tantangan dari kalangan kelas menengah yang berada, percaya diri, dan berpikiran liberal yang jumlahnya terus meningkat.

Stigmatisasi tidak semata-mata diberikan kepada mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap *status quo*, tapi juga kepada kolega-kolega pejabat negara dan kaum oposisi, atas tuduhan perbuatan salah.<sup>12</sup>

Pejabat dengan mudah menggunakan stigmatisasi ini untuk keuntungan pribadi, sebuah perbuatan yang dianggap wajar saja. Masyarakat pun akhirnya tergoda menggunakan strategi yang sama dalam perseteruan mereka satu sama lain. Berikut kita akan melihat dengan jelas bagaimana otoritarianisme beroperasi dengan cara yang rumit dan tersebar.

Menjelang akhir konflik internal (1993-1995) yang menghancurkan salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana, tiga dosen dipecat secara tidak hormat karena hubungan mereka dengan komunis. Untuk singkatnya, saya akan fokus pada salah satu dari kolega saya yang lama dipenjara di Pulau Buru tanpa proses peradilan. Ia dipenjara karena saat polisi mencari saudara dekatnya, ia sedang sendirian di rumah pada 1965 itu. Karena takut dikira melindungi orang yang sebetulnya juga tersangka, polisi tersebut malah membawa lelaki tanpa salah itu.

Saat dibebaskan pada awal 1980-an, semua tahanan politik dilarang menduduki “jabatan strategis”, termasuk mengajar. Namun, di bawah rezim otoriter Orde Baru, seperti juga mantan teman satu penjara lainnya, pria ini mendapatkan pekerjaan sebagai dosen di universitas swasta tersebut tanpa harus menyembunyikan identitas-

<sup>12</sup> Pada 1988, praktik-praktik diskursif yang beragam dan sering terbatas bertemu dan menimbulkan ledakan dahsyat selama lebih dari setahun. Korban berkisar antara pegawai negeri, anggota DPRD, tokoh partai politik, sampai pejabat tinggi negara. Banyak rencana pernikahan yang dibatalkan. Wakil presiden saat itu diserang banyak kabar burung. Untuk penjelasan yang pendek namun menolong, dalam bahasa Inggris, mengenai situasi pada 1988, lihat Lane (1991: 11-12), Motek (1988: 8), Reeve (1990:156), *TAPOL* (1988: 5-6), Van de Kok dan van Langenberg (1990: 163-166).

nya. Komandan militer setempat tahu latar belakangnya, dan secara berkala melakukan pengawasan diam-diam.

Karena trauma oleh hukuman penjara yang dijalannya pada 1960-an dan 1970-an, dan maklum akan kerapuhannya, pria ini secara sadar menjauh dari konflik internal universitas. Namun, ketika konflik tersebut memuncak, seiring dengan pergesekan antara elite politik di Jakarta, mantan tahanan politik itu pun tersorot. Salah satu kelompok yang bertikai di universitas menudingnya sebagai cara untuk memojokkan kelompok lawan. Seorang pejabat tinggi di Jakarta menyebut namanya di depan umum, untuk membuktikan tuduhan awal bahwa subversif komunis masih bertahan dan bahkan memiliki jabatan strategis. Beberapa media membesar masalah itu untuk meningkatkan penjualan mereka. Komandan militer setempat dengan setengah hati akhirnya mengambil langkah terhadap dosen yang tidak pernah ia ganggu selama bertahun-tahun itu.

Peristiwa-peristiwa tersebut sering dibahas, namun hanya sambil lalu. Orang sering menyesali dan mencibir, tapi tidak pernah ada yang secara serius mempelajarinya secara cermat. Kebenaran diasumsikan sebagai hal yang tidak perlu dibuktikan, meski secara etik menghebohkan, kasus ini tidak menarik dan tidak problematik secara akademis. Para akademisi seolah menganggap isu ini ranah aktivis hak asasi manusia, yang dianggap kurang memiliki pemikiran kritis, tapi secara sosial punya komitmen terhadap tujuan luhur.<sup>13</sup> Yang paling umum dan menggelitik adalah asumsi bahwa para

<sup>13</sup> Bahkan buku Ben Anderson berjudul *Language and Power* (1990) yang banyak dipuji, yang kritis dan bersemangat di dalam menggali praktik-praktik diskursif dalam politik Orde Baru, mengesampingkan isu itu. Hanya ada satu buku yang menjadi pionir sampai saat ini mengenai pembunuhan massal 1965/1966, yang diedit oleh Robert Cribb (1990), sedang yang lainnya meneroka representasi kesusastraan. Keith Foulcher barangkali memberikan sumbangan lebih besar daripada orang lain yang menuliskan isu ini dalam bahasa Inggris (1986, 1990, 1994).

pejabat dalam sebuah negara otoriter punya kuasa dan harus melakukan kekerasan terhadap subyek-subyek mereka demi keuntungan politik. Singkatnya, kekerasan diasumsikan sebagai alat yang berguna di tangan penguasa.

Dalam sebuah wawancara dengan seorang wartawan Indonesia, Sutopo Yuwono, mantan kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Indonesia, mengenang pekerjaan intelijen di bawah Orde Baru (*Jakarta-Jakarta* 1993: 33).

Yang lucu dari dunia intelijen ini adalah teknik perang urat syaraf. Sebagai petugas intelijen, kami membuat isu-isu, dan menyebarkannya di media cetak, radio, atau televisi. Kami memperlakukan isu itu seolah-olah nyata. Saat isu itu beredar secara luas, biasanya orang akan membicarakannya dan menambahkan sesuatu atau melebih-lebihkannya. Akhirnya isu itu akan kembali (pada badan intelijen) dalam bentuk laporan. Lucunya, laporan-laporan ini cenderung membuat kami percaya bahwa isu-isu tersebut benar adanya, hahaha. Bahkan kami jadi takut sendiri dan mulai berpikir, ‘bagaimana jika isu ini benar?’ Hahaha.

Pengakuan tersebut penting untuk mengingatkan kita akan bahaya dan betapa sia-sianya paradigma yang bersifat umum tapi menyesatkan dari ilmu sosial modern yang membuat asumsi-asumsi gabungan mengenai subyek berpengaruh. Paradigma ini juga memperhitungkan sesuatu secara rasional, serta menguasai dan memanipulasi instrumen politik untuk memaksimalkan kepentingan, nilai, atau dominasi atas orang lain. Dalam wacana dominan seperti itu, kepelikan medan perang dan antagonisme menonjol, namun pemisahan antara subyek dan obyek kekuasaan diasumsikan tidak ada. Begitu pula dengan garis yang memisahkan dua kelompok yang saling berhadapan: penguasa dan yang dikuasai.

Akademisi dalam bidang ini atau bidang yang terkait tidak dapat mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kecuali mereka yakin

bahwa semua pernyataan mengenai “ancaman komunis” tidak terlalu penting, karena hanya menyuguhkan atau menjelaskan sesuatu yang “benar”, sehingga menjadi kebenaran kelas dua. Seolah-olah yang benar-benar penting adalah apa yang dilakukan dan apa yang dicapai secara materi atau politis, bukan apa yang dikatakan, diartikan, atau dimengerti dalam pidato, judul-judul berita, monumen, film, karya sastra, gosip, mimpi, dan kenangan. Seolah-olah pemisahan antara kedua hal itu bersifat tetap dan mudah dilakukan.

Sambil mempertahankan beberapa keyakinan dalam dunia nyata dan sosial serta transparansi (jika terbatas) bahasa, mari kita lihat beberapa peristiwa keseharian yang relevan. Fokus saya dalam bagian-bagian berikut ini adalah detail kecil dari sejumlah peristiwa sederhana dan lokal, bukan pameran keangkuhan seperti monumen, buku putih, atau film propaganda mahal yang diluncurkan pemerintahan Orde Baru. Berbeda dari propaganda besar-besaran mengenai Pancasila yang menarik perhatian banyak pengamat asing, wacana ancaman komunis menembus ke dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, dan menjadi fondasi paling penting bagi otoritarianisme Orde Baru. Ini bukanlah instrumen politik yang diterapkan dari atas terhadap populasi abstrak. Mbembe (1992: 4) merincinya saat ia mengemukakan bahwa:

*[A]ccount for postcolonial relations is thus to pay attention to the workings of power in minute details, and to the principles of assemblage which give rise to its efficacy. That is, one must examine the orderings of the world it produces; the types of institutions, knowledges, norms, and practices that issue from it; the manner in which these institutions, knowledges, norms, and practices structure the quotidian; as well as the light that the use of visual imagery and discourse throws on the nature of domination and subordination.*

([U]ntuk menjelaskan relasi pascakolonial, harus diperhatikan kerja

kekuasaan sampai sekecil-kecilnya, serta prinsip-prinsip kelompok yang menyebabkan keberhasilannya. Harus juga ditelaah susunan dunia yang dilahirkannya; jenis-jenis lembaga, pengetahuan, norma, dan praktik-praktik yang dihasilkannya; tata cara di mana lembaga, pengetahuan, norma dan praktik-praktik tersebut membangun kehidupan sehari-hari; demikian juga dengan penggunaan citraan visual dan wacana dalam lingkup dominasi dan subordinasi.)

Ada serangkaian contoh yang menunjukkan bahwa ancaman komunis bukan—paling tidak pada saat awal—merupakan tipuan atau manipulasi politik pejabat negara yang dipakai untuk menekan oposisi atau memperkuat kekuasaan dan kepentingan pribadi. Pernyataan, narasi, dan praktik tersebut terkadang berdiri sendiri, terpisah dari isu yang sebenarnya. Dalam hal ini, ancaman komunis muncul menjadi “lebih nyata”, atau “hyperreal” menurut Baudrillard (1983b, 1988), meskipun perlu ada pembatasan kritis.

### Palu arit dalam budaya pop

Sama halnya dengan di tempat lain, ekspansi industri hiburan dan budaya pop global juga merambah Indonesia setelah Perang Dingin berakhir. Namun, tidak seperti di banyak negara, di Indonesia hal ini membangkitkan dan memberi bentuk baru hantu komunis. Pada pertengahan Oktober 1993, kepanikan melanda budaya pop. Di Purbalingga, kejaksaan negeri setempat menyita album *rock* baru berjudul *Magis* dari penyanyi Atiek CB.

Yang mendorong tindakan hukum tersebut adalah gambar di sampul depan album, berupa kolase penuh warna gambar orang-orang yang bergaya dan berpose dengan aksesoris logam. Di sampul muka adalah foto sang penyanyi, dengan kaca mata hitam dan kalung salib. Di belakangnya, ada gambar kecil pria, juga berkaca mata hitam dan berkulung, namun ornamennya berupa palu dan arit.

Hanya orang naif yang akan langsung mempertanyakan apa niat

di belakang desain, produksi, gambar, tindakan hukum, seolah-seolah ada kebenaran yang disembunyikan. Mengadakan penelitian akademis untuk membuktikan tidak adanya niat subversif, atau bahwa gambar kalung itu hanyalah simbol kosong adalah sesuatu yang sia-sia. Tantangan terbesar dari rangkaian peristiwa, praktik, pernyataan dan pernyataan balasan maupun kebungkaman, ada di permukaan semua hal itu. Komunis dan komunisme sebenarnya tidak relevan di sini, tidak seperti efek dari citra keduanya pada peristiwa sejarah tertentu.

Polisi dan pegawai kejaksaan negeri berkeliaran di jalanan di banyak kota, memburu kaset yang dituduh "komunis" tersebut. Mereka harus memanggil dan menginterogasi orang-orang yang ada di balik produksi dan penjualan album tersebut. Tokoh-tokoh penting menulis kolom dan berkomentar dalam wawancara. Surat kabar terbesar, *Kompas* (1993a), menulis bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga mempertanyakan mengapa album tersebut dijual begitu dekat dengan September, "ketika bangsa ini baru saja diingatkan akan kudeta Partai Komunis Indonesia yang gagal" pada 1965. Undang-Undang Anti Subversi, yang menetapkan hukuman mati sebagai hukuman terberat dan sering digunakan untuk menjaring tertuduh subversif, membayangi diskusi publik mengenai *Magis*.

Salah satu akibat dari peristiwa tersebut adalah pelarangan dan penarikan sukarela lagu populer "Kau di Mana?" dari album tersebut. Toko musik dan stasiun radio menyingkirkan album tersebut dan berpura-pura album itu tidak pernah ada (*Jawa Pos* 1993b). Sebetulnya tidak ada pelarangan resmi, tapi sulit menyebutnya boikot. Jumlah kerugian materi bagi produser dan penyanyi tidak diketahui. Tapi kemudian, pemerintah pusat menyatakan kasus tersebut tidak lebih dari keteledoran teknis. Kasus itu dinyatakan jelas dan selesai (*Jawa Pos* 1993a; *Kompas* 1993b). Tidak ada seorang pun, bahkan aktivis hak asasi manusia dan anggota lembaga bantuan hukum sekalipun, yang mempertanyakan kemungkinan rehabilitasi atau

kompensasi bagi produser dan sang artis. Sebuah penyelidikan hukum akan menimbulkan pertanyaan mengenai sifat kejahanatan dan momok yang orang banyak tidak ingin mendengar atau memahaminya.<sup>14</sup>

Yang sangat menakjubkan dari pemerintahan Orde Baru di Indonesia adalah kekuatannya memanipulasi dan menakut-nakuti anak-anak yang percaya pada liberalisme Barat untuk melawan vulgaritas dan represi absolut. Meski, atau tepatnya karena, ada tindakan-tindakan keras atas perlawanan terhadap ancaman *simulacral*, musuh terus datang dan datang lagi tanpa keinginan balas dendam dan persekongkolan bawah tanah untuk menciptakannya.<sup>15</sup>

Hanya satu bulan setelah itu kegelisahan lain melanda Kejaksaan Tinggi Semarang. Para petugas harus bekerja keras menyelidiki penemuan 129 eksemplar dari 87 judul buku yang "mengandung pemikiran komunis" (*Kedaulatan Rakyat* 1993). Buku-buku ini tiba di pelabuhan Semarang dalam sebuah kontainer besar yang berisi 40.000 eksemplar buku akademis sumbangannya sebuah universitas di Amerika Serikat untuk Universitas Diponegoro sebagai bantuan

---

<sup>14</sup> Sampai Soeharto mundur pada Mei 1998, hanya ada dua kasus hukum yang dibawa ke pengadilan oleh mantan tahanan politik dan keluarga mereka untuk mendapatkan kompensasi atas kerusakan material, pembunuhan, hilangnya properti, hak-hak sipil, dan pengasingan yang menimpa ratusan ribu warganegara selama lebih 10 tahun tanpa prosedur hukum setelah pertumpahan darah 1965. Tuntutan hukum semacam itu yang pertama datang dari penulis sastra kawakan Pramoedya Ananta Toer (*Forum Keadilan* 1996a; *Kompas*, 1996). Yang kedua adalah dari Ibu Syofinar, anggota masyarakat kebanyakan (lihat *Forum Keadilan* 1996c: 32).

<sup>15</sup> Banyak dari kasus yang disebutkan di sini merupakan kasus yang terjadi baru-baru ini, dan kebanyakan di Jawa Tengah, salah satu lokasi penting tempat berlangsungnya pembantaian 1965/1966. Namun, reproduksi ancaman komunis yang *simulacral* dapat ditemukan di seantero negeri dalam versi, intensitas, frekuensi, dan efek yang berbeda-beda.

untuk program pascasarjana yang baru dibuka.<sup>16</sup>

Beberapa hari kemudian, petugas keamanan Riau menemukan lambang palu arit dalam permainan video anak-anak. Seri permainan *Street Fighter* itu menampilkan juara-juara bela diri dari banyak negara: Spanyol, India, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Rusia. Delegasi dari masing-masing negara memakai seragam dengan lambang nasional. Simbol yang bermasalah muncul dengan “sangat jelas”, seperti yang diberitakan sebuah media dengan nada ketakutan, saat seorang tokoh Soviet bernama Zangief muncul di layar. Dalam beberapa bulan, ikon serupa muncul di kartu bergambar adegan-adegan dari *Street Fighters* yang beredar di Jawa (*Bernas* 1994; *Jawa Pos* 1994). Hampir dua tahun berikutnya, petugas keamanan di Jawa juga menemukan kejadian serupa dalam kaset permainan video Nintendo (*Surya* 1995).

Beberapa bulan sebelum kasus *Magis*, kasus palu arit lain juga muncul di Semarang. Pada Februari 1993, media melaporkan penemuan simbol terstigmatisasi itu dalam desain kaos di sebuah pasar swalayan besar. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan saat itu, Laksamana (Purn.) Sudomo menghubungkan desain kaos itu dengan pembebasan 30.000 tahanan politik dari Pulau Buru lebih dari 10 tahun sebelumnya (*Bernas* 1993a).<sup>17</sup> Pada Oktober 1995, lambang bermasalah tersebut juga ditemukan pada sebuah merek

celana pendek (*Gatra* 1995).

Pada Maret 1993, beberapa ratus kilometer dari Semarang, komandan daerah militer Blora mengumumkan penyitaan sejumlah gantungan kunci bergambar palu arit. Gantungan kunci itu bergambar palu di satu sisi, dan arit sisi lain. Namun, menurut versi resmi, “jika dihubungkan, lambang itu mirip lambang partai terlarang, yaitu PKI” (*Bernas* 1993b). Kata “jika” dan “mirip” dari penguasa negara terpadat keempat di dunia tersebut adalah sesuatu yang tidak dimengerti oleh mahasiswa ilmu sosial dan politik. Apa pun pengertiannya, komandan daerah militer itu menarik kesimpulan yang cukup jelas:

Simbol ini bukan sekadar dekorasi, tapi ada unsur kesengajaan. Yang terpenting, hal ini menandakan bahwa kelompok tersebut (komunis) masih ada. Orang-orang yang awam politik tidak akan menyadari hal ini, tapi bagi kami jelas bahwa hiasan ini berarti sesuatu.

Pada 1996, setelah kampanye luas melawan PRD diluncurkan, ada keresahan muncul saat inisial PRD ditemukan dalam tiruan seragam militer milik partai penguasa Golkar! Kasus ini surut ketika otoritas tertinggi intelijen dan badan militer mengumumkan bahwa motif abstrak yang dipertanyakan itu bukan PRD melainkan PRT, singkatan dari Printex, pabrik penghasil seragam tersebut (*Jawa Pos* 1996).

Rangkaian peristiwa semacam itu terus berlangsung hampir tanpa jeda. Simbol bermasalah tadi berkembang terkait dengan barang konsumsi untuk anak-anak. Dalam satu peristiwa, komando daerah militer di Jawa Timur menangani kasus bungkus manisan yang konon bergambar simbol terstigmatisasi itu (*Jawa Pos* 1995). Dan kasus berikutnya paling diingat orang. Pada pertengahan Maret 1995, lagi-lagi sebuah mainan anak menjadi sasaran perburuan anti-komunis oleh pemerintah dan militer setempat. Yang menganggu

<sup>16</sup> Pada Desember 1992, saya menerima pemberitahuan dari Kantor Bea Cukai Semarang, yang mengatakan bahwa divisi “anti-penyaludupan” Departemen Imigrasi telah menyita sebuah buku yang masuk bersamaan dengan sebuah bingkisan. Buku tersebut ditahan karena judulnya *Atheist*. Petugas bea cukai menganggap buku tersebut menyuarakan ateisme dan karena dianggap sama dengan komunisme maka ilegal.

<sup>17</sup> Para narapidana ini dibebaskan berkat tekanan dunia internasional atas dasar hak asasi manusia. Dan seperti yang diceritakan Daniel Lev (1992), mereka dilepaskan tanpa prosedur hukum, sama seperti ketika mereka dibawa ke pulau tersebut setelah terjadi tragedi 1965.

otoritas lokal adalah balon berbentuk palu. Lebih parah lagi, menurut petugas setempat, saat anak-anak memainkan dan memukul-mukul sesuatu dengan balon tersebut, mainan itu menimbulkan suara yang mirip dengan bunyi /arit/ (*Suara Merdeka* 1995).

Mari kita anggap semua kasus di atas sebagai kesalahpahaman petugas pemerintahan yang tidak berpengetahuan atau terlalu fanatik. Peristiwa berikut ini mengandung sebuah pelajaran. Lebih dari 1.000 kilometer dari Riau, di mana permainan video *Street Fighter* ditemukan beberapa bulan sebelumnya, pimpinan militer di Jawa memperingatkan masyarakat akan gambar mengerikan pada mainan dan kartu bergambar untuk anak-anak, yang merupakan derivatif dari serial permainan video *Street Fighter*. Barang-barang ini, menurut komandan daerah militer, “membahayakan jiwa anak-anak” (*Bernas* 1994; *Jawa Pos* 1994). Kasus tersebut menyita perhatian media bukan karena rasa curiga berlebihan petugas intelijen, melainkan karena simbol berbahaya tersebut pertama kali menarik perhatian Pupung Galih Bagasworo, seorang murid sekolah dasar di Ambarawa berumur 10 tahun. Atas saran gurunya, ia memberikan kartu tersebut pada kakeknya, Sunaryo (60), mantan anggota DPRD, yang kemudian memberikannya pada komandan Koramil, Lettu Inf. Djumadi (*Bernas* 1994).

## **Kenikmatan salah paham**

Ancaman komunisme mungkin tidak nyata, meski keberadaannya sering diumumkan dan diikuti kehebohan. Ancaman komunisme ini bukan pura-pura atau sebentuk gertakan, melainkan sebentuk *hyperreal*, seperti diilustrasikan oleh kasus-kasus di atas, termasuk perburuan besar-besaran pada 1988 dan tahun-tahun sebelumnya.

Kekuatan dahsyat momok *simulacral* ini, dan reproduksinya, tidak datang dari dirinya sendiri atau dunia bebas tanpa tanda-tanda yang mengambang. Tidak dapat dimungkiri, momok itu mendapatkan kekuatan yang dahsyat, paling tidak sebagian, dari pertumpahan

darah pada 1965-1966, dan hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada tahun-tahun sesudahnya. Namun, ada dua hal yang perlu diingat di sini. Pertama, segala peristiwa yang terjadi setelah itu tidak pernah berlangsung segera, langsung, atau seragam. Kedua, meski kekuatan wacana antikomunis bersumber pada kekerasan massal, patut diragukan bahwa kekerasan tersebut sudah diketengahkan oleh wacana yang kuat, juga belum dieksplorasi lebih jauh.

Tadi sudah dibahas keberadaan palu arit dalam hidup keseharian masyarakat Indonesia. Bentuk dan asalnya tidak sama. Beberapa lambang yang dikomodifikasi itu boleh jadi ditafsir berlebihan oleh aparat keamanan. Yang lainnya barangkali memang sengaja dibuat oleh warganegara biasa, sebagai gaya hidup, ingin tampil beda, atau sekadar lelucon. Berikut ini akan kita lihat bahwa meski gerakan antikomunis Orde Baru itu dominan dan meluas, sifatnya tidak pernah total.

Selama puncak perayaan ulang tahun emas kemerdekaan negara ini pada tahun 1995, seorang tukang bakso bernama Siran, 24 tahun, ditahan dan menjalani serangkaian interrogasi yang panjang oleh aparat keamanan di Jawa Barat. Seperti tradisi masyarakat, Siran menghias dan merapikan rumah dan pekarangannya seperti yang dilakukan jutaan rakyat lainnya. Bedanya, ia menulis “PKI Madiun Bangkit” di dinding rumahnya.

Siran memang berasal dari Madiun dan sering mendengar tentang PKI Madiun. Namun, saat interrogasi ia bersikukuh bahwa ia tidak tahu apa arti PKI sebenarnya. Ia tetap dengan pernyataannya bahwa penulisan slogan itu hanya untuk “lucu-lucuan”. Seorang petugas komando daerah militer menganggap alasan tersebut “tidak masuk akal”, seolah-olah penangkapan Siran atau perburuan antikomunis lebih logis (*Forum Keadilan* 1995: 29-30).

Apa pun motivasi Siran sebenarnya, ia harus membayar lelucon itu. Ia tidak saja ditahan meski sebentar, dan harus melapor setiap minggu setelah dibebaskan, istrinya dan delapan orang penjual bakso

lain juga ditahan dan diinterogasi karena berhubungan dengan Siran. Tidak ada yang boleh meninggalkan kota itu tanpa izin khusus dari otoritas daerah (*Forum Keadilan* 1995: 29-30; *Kompas* 1995: 15).

Tidak semua penduduk Indonesia yang melakukan hal sama dijatuhi hukuman. Pada awal 1980-an, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, sekelompok anak-anak begitu saja memilih palu arit sebagai lambang tim sepak bola mereka. Rupanya mereka mengambil gambar tersebut dari poster film *Pengkhianatan G30S/PKI* yang tidak pernah mereka tonton karena tidak sanggup membayar tiket bioskop. Kapitalisme global pada era pasca-Perang Dingin telah mengubah industri hiburan. Perubahan-perubahan ini mengirimkan pesan kuat pada banyak orang Indonesia bahwa kelangkaan berbanding lurus dengan nilai pasar.

Pada akhir 1990-an, polisi Jawa Tengah memburu uang kertas keluaran 1964 yang bergambar Presiden Sukarno dan logo partai terlarang, yang saat itu sedang populer di kalangan kolektor (*Yogya Post* 1990b). Kurang lebih pada saat yang sama, di Bandar Udara Ujungpandang, seorang turis asing harus menghadapi interogasi sebelum akhirnya dilepaskan oleh petugas keamanan karena membawa tas bergambarkan palu arit di salah satu sisinya (*Yogya Post* 1990a). Pada akhir November 1995 di Sidoarjo, aparat keamanan setempat menemukan kaos mencurigakan dijual bebas. Di bagian belakang kaos itu ada gambar seorang pria kekar berambut panjang, tangannya memegang palu dan arit. Di bawah gambar itu ada tulisan “Mr Mbelink”, istilah slang untuk pemberontak (*Surya* 1995: 5). Perdagangan modern telah meningkatkan nilai komersial dari lambang yang dulu dilarang dan dianggap revolusioner, dan menjadikannya sebuah motif yang sempurna bagi konsumerisme massal.

Waktu mengubah tidak saja nilai dan makna logo palu arit, namun juga narasi utama *Pengkhianatan G30S/PKI*. Pada 1992, anak laki saya yang berumur 10 tahun suatu hari pulang sekolah, bercerita dengan semangat asyiknya bermain ala PKI dengan teman-

teman sekolahnya. “Apa katamu?” saya setengah tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Ia menjelaskan bahwa di sekolah anak-anak meniru narasi yang mereka dengar dalam pelajaran sejarah atau dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*. “Semua ingin main jadi PKI, mengejar-ngejar mereka yang menjadi jenderal bodoh yang harus lari dan sembunyi sampai di kamar mandi. Kami kemudian menangkap dan memaki-maki mereka. Benar-benar asyik.”

Anak-anak ini telah melihat dan mendengar film *Pengkhianatan G30S/PKI* dengan cara seperti yang dibentuk oleh Hollywood dengan *Rambo* atau *Rocky* atau film-film kungfu populer dari Hongkong. Tapi ada perbedaan mendasar antara narasi utama Orde Baru dan film-film asing tersebut. Dalam kebanyakan film asing, sang jagoan biasanya adalah lelaki kasar. Berbeda dari narasi utama Indonesia pasca-1965, serial pascaperang Vietnam *Rambo* dan *Rocky* lebih jujur menampilkan keinginan narsistik pemerintahan Reagan untuk melakukan kekerasan pada musuh. Jika misi tersebut terlalu sulit dijalankan di pegunungan tropis di Vietnam, maka lebih mudah menampilkan tiruannya dalam studio Hollywood dan khayalan para penonton.<sup>18</sup>

Orde Baru mencoba sedikit lebih pintar dari pembuat film Hollywood dan Hongkong dengan menutupi kekerasan yang dilakukannya terhadap musuh dalam narasinya.<sup>19</sup> Strategi naratif ini tidak

<sup>18</sup> Hal sebaliknya kita lihat pada taman dan monumen di kedua rezim tersebut. Disneyland, seperti yang dilihat Baudrillard (1988: 172), diciptakan sebagai fiksi untuk membuat kita berpikir bahwa di luar itu, semua yang ada di negara tersebut nyata meski semuanya terlihat *hyperreal*. Orde Baru membangun Museum Pengkhianatan PKI untuk menghilangkan pemisahan antara yang nyata dan tidak nyata atau *hyperreal*. Rezim ini menerbitkan narasi yang sama mengenai kudeta komunis dalam buku-buku pelajaran sekolah, sejarah resmi, buku putih, film, dan apa yang disebut ‘novel’.

<sup>19</sup> Untuk keterangan yang lebih banyak lagi mengenai logika tuduhan naratif dalam kekerasan politik negara, lihat pembahasan komparatif Helen Fein mengenai pembantaian di Indonesia dan Kamboja (1993).

hanya berlawanan dengan kebanyakan film Hollywood dan Hongkong, tapi juga dengan karya yang lebih tua yaitu kisah epik Mahabarata, khususnya perang Baratayuda. Dalam hubungan ini, kesalahan anak-anak dalam membaca narasi tersebut tidak mengejutkan.

Apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi sama dengan yang dilakukan orang dewasa saat terlibat dalam produksi dan konsumsi album *Magis* atau kaos dan gantungan kunci bergambar palu arit. Ini dapat dilihat sebagai bentuk keseharian dari penerimaan lokal. Tidak ada resistensi ala *Weapons of the Weak* James Scott (1985) atau karnaval rusuh Mikhail Bakhtin. Pemahaman Baudrillard (1983a: 43) mengenai massa lebih relevan dalam hal ini:

*Traditional resistance consists of reinterpreting messages according to the group's own code and for its own ends. The masses, on the contrary, accept everything and redirect everything en bloc into the spectacular, without requiring any other code, without requiring any meaning, ultimately without resistance . . .*

(Resistensi tradisional terdiri dari tafsir ulang pesan-pesan yang didasarkan pada kode-kode kelompok dan tujuan mereka sendiri. Massa, sebaliknya, menerima dan mengarahkan apa saja secara *keseluruhan* menjadi sebuah pertunjukan, tanpa menuntut kode lain, tanpa menuntut makna, dan akhirnya tanpa resistensi...)

Saat Achille Mbembe berbicara mengenai kondisi pascakolonial sebagai *simulacral regime* par excellence (“rezim *simulacral* yang sempurna”) (1992:11), ia mengemukakan sebentuk relasi kekuasaan yang sama sekali tidak tertata secara rasional atau terawasi secara ketat. Mereka cenderung *free up the potential for play, improvisation, and amusement, within the veri limits set by officialdom* (“membebaskan potensi permainan, improvisasi, dan hiburan, dalam batas-batas yang diberikan oleh otoritas”).

Banyak cerita yang bisa ditulis mengenai praktik salah mengartikan dan bertahan di bawah rezim pascakolonial yang otoriter. Beberapa karya sastra dan teater telah lahir dalam mendekonstruksi narasi utama dari ancaman *simulacral*, dan untuk itu diperlukan pembahasan yang terpisah.<sup>20</sup> Tentu saja tidak ada maksud meremehkan atau menepikan resistensi yang disengaja dan diperhitungkan oleh para penulis sastra dan aktivis politik. Contoh-contohnya akan dibahas dalam sub-bab berikut.

## Subversi dari kepatuhan yang luar biasa

Orang Indonesia senang bermain dengan kata-kata. Salah satu tradisi Jawa adalah *plesetan*, yang menekankan dan merayakan hubungan yang goyah dan manasuka antara penanda (*signifiers*) dan petanda (*signified*), serta hubungan keduanya dengan apa yang diacu di dunia nyata.<sup>21</sup> Permainan ini sangat diminati oleh masyarakat yang tidak berdaya di bawah tekanan sewenang-wenang kekuasaan pemerintahan otoriter. Subversi atas kepatuhan luar biasa terbukti efektif selama pemilihan umum 1992.<sup>22</sup> Pada masa Orde Baru, pemilihan umum sama sekali tidak berarti bertanding dan

<sup>20</sup> Sebagai contoh, produksi teater berjudul *Orde Tabung* Teater Gandrik (1988), *Opera Ular Putih* Teater Koma (1994), atau karya sastra seperti *Nyali Putu Wijaya* (1983), dan tulisan politis yang lebih berani oleh Pipiet Rochijat (1993). Lihat juga pembicaraan Keith Foulcher (1990) mengenai *Anak Tanah Air Ajip Rosidi* (1985).

<sup>21</sup> *Plesetan* secara umum terbebas dari penjajahan dan pembatasan akademis. Istilah itu mencakup variasi yang luas dari praktik-praktik retorika dan kesusastraan. Salah satu bentuk populernya adalah permainan bebas dan tidak berdasar aturan dengan memindahkan atau menambahkan fonem, morfem, suku kata, atau kata dari pernyataan yang umum, tapi tanpa membongkar dalam pernyataan yang koheren dan tetap dari yang didekonstruksi. Lebih jauh lagi mengenai *plesetan*, lihat Heryanto (1996b).

<sup>22</sup> Lihat pandangan Baudrillard (1983a: 47-48) mengenai kerusakan yang dimungkinkan oleh simulasi dan penyesuaian yang berlebihan.

memenangkan suara terbanyak. Hasil akhirnya selalu sudah dapat diperkirakan. Meski begitu, biasanya ada ilusi kolektif bahwa pemilihan tersebut adalah upaya masyarakat merdeka untuk memberikan mandat bagi rezim melalui kompetisi dengan partai lawan.<sup>23</sup> Selalu ada mobilisasi massa berskala nasional selama minggu-minggu kampanye.

Kemeriahan selama masa kampanye yang disponsori pemerintah untuk menutupi peristiwa itu diikuti oleh masyarakat umum yang menerima saja konsep itu. Ada arak-arakan di jalanan, pesta, konser terbuka, dan terkadang pembagian makan siang dan kaos gratis. Saat pemerintah mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam politik formal, jelas itu berarti mobilisasi yang tidak lebih dari festival jalanan dan hiburan massal lima tahunan. Masyarakat menyambut undangan itu dan mendorongnya sampai batas yang diperbolehkan.

Berbeda dari masyarakat kota kelas menengah yang melancarkan kampanye boikot, masyarakat umumnya mendukung secara formal pemilihan umum tersebut, tetapi dengan melanggar semua peraturan dan perundangan (yang paling nyata adalah peraturan lalu lintas). Kegairahan massa pada 1992 untuk kampanye pemilu begitu liar sampai aparat keamanan harus membubarkan beberapa acara gembira. Sekali lagi, dalam keputuhan luar biasa yang merupakan respon dari pembatasan, massa membawanya ke titik ekstrem dengan

<sup>23</sup> Pada pemilu 1997, rezim Orde Baru menghadapi tantangan yang tidak pernah ada sebelumnya dari badan independen pertama yang mengawasi jalannya pemilu, yaitu KIPP (Komite Independen Pengawasan Pemilu). Karena merasa terancam, pejabat negara melakukan segala macam kekerasan untuk menekan aktivitas dan aktivis KIPP. Namun, saat ditanya dalam sebuah obrolan pribadi apa yang ia harapkan dapat dicapai oleh lembaga itu, salah satu pendiri KIPP yang sekaligus tokoh ternama, memberi komentar dengan nada menyindir: “Pemerintah berpura-pura bahwa pemilihan ini dilakukan dengan adil dan jujur. Jadi, kami juga berpura-pura mengawasi aktivitas mereka.”

menarik diri sepenuhnya dari kemeriahan publik yang mengancam perayaan dan kredibilitas pemilu (Heryanto, 1996c).

Karena rezim Orde Baru secara rutin menampilkan peradilan yang telah diatur untuk menekan kelompok oposisi dan selalu berhasil, rasa putus asa mendorong subyek-subyek tak berdaya memainkan permainan yang sama dan mendorongnya pada titik ekstrem yang logis. Alih-alih melawan, menghindar, atau mencaci maki rezim, Megawati, ketua PDI yang dicopot, aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan para wartawan mencecar pemerintah dengan ratusan tuntutan hukum, tanpa sedikitpun mimpi kasus tersebut akan mereka menangkan melalui hasil investigasi hukum independen (Heryanto, 1996a, 1996d, 1997). Tuntutan hukum tersebut lebih dimaksudkan untuk membuat gusar pemerintah daripada membongkar kebohongan hukum, dan memaksa pemerintah mempertahankan prosesi kebohongan itu sampai titik ekstrem.

Pada 1994, aktivis mahasiswa Nuku Soleiman yang berumur 29 tahun dihukum penjara lima tahun setelah Pengadilan Negeri Jakarta menyatakannya bersalah karena membuat stiker bertuliskan *plesetan* yang “menghina” presiden.<sup>24</sup> Saat itu Nuku memimpin sebuah LSM radikal bernama Pijar. Ada yang beranggapan bahwa tuduhan resmi jaksa bukanlah alasan sebenarnya, dan ada motif nyata, rasional, serta teruji di balik itu. Namun, rasionalisasi serupa dapat diberikan pada contoh-contoh kasus yang saya berikan sebelumnya. Bahkan jika pemikiran tersebut cukup sahih, tetapi saja tidak jelas mengapa pemerintah merasa perlu menutupi tuduhan sebenarnya jika ada cukup ruang untuk menghukum Nuku dengan prosedur standar. Yang kurang jelas dan lebih relevan adalah mengapa mereka memilih

<sup>24</sup> Foto berwarna Nuku Soleiman muncul di halaman muka *Inside Indonesia* (1994). Pandangan mengenai kasus ini dapat ditemukan di halaman 11-12.

tuduhan palsu ini, bukan yang lain. Mengapa memilih *plesetan* Nuku sebagai tindak kriminal?

Tidak ada jawaban yang tersedia bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sama seperti kekerasan massal yang brutal pada 1965-1966, tuntutan hukum, intimidasi negara, dan perburuan tidak mengikuti logika instrumentalisme. Baik pelaku dalam kekerasan oleh negara dan korbannya terjebak dalam jaringan rumit tanda-tanda budaya, intelektual, dan moral. Seperti bahasa, struktur penanda tersebut memberdayakan mereka untuk melakukan banyak hal sekaligus membatasi mereka untuk melakukan hal lain.

Karena itu, meski kekerasan negara seragam secara fisik dan materi, selalu ada pengaruh unsur, kebiasaan, dan ingatan kolektif setempat yang menyebabkan makna tiap kasus berbeda-beda. Itu sebabnya penekanan Mbembe mengenai “kerja kekuasaan sampai kecil-kecil” patut diperhatikan. Dalam konteks lain yang sama relevannya, Coronil dan Skurski (1991: 330) mengemukakan bahwa *physical violence, not unlike painting, is a vehicle for making and encoding history whose specific form and significance cannot be understood outside that history* (“kekerasan fisik, tidak seperti lukisan, adalah wahana untuk membuat dan menuliskan sejarah di mana bentuk dan maknanya yang spesifik tidak dapat dipahami di luar lingkup sejarah tersebut”). Oleh karena itu, dengan menempatkan kekerasan politik *within the history of their making* (“dalam pembentukan sejarahnya”) kita dapat berharap *to decode the semantics of violence, and listen to what was said* (“menerjemahkan makna kekerasan dan mendengarkan apa yang diungkapkannya”) (333).

Dengan cara serupa, tanggapan terhadap kekerasan negara dapat dipahami. Berikut adalah bagaimana sesama aktivis mendukung tanggapan Nuku Soleiman atas dakwaan terhadapnya. Sejak awal persidangan Nuku dan kelompok pendukungnya muncul di ruang sidang seperti sedang memasuki panggung teater dan dengan

kesungguhan ala Brechtian untuk memperlihatkan senjata strategis mereka. Mereka berilusi bahwa Nuku akan dibebaskan, dan tidak tampak keputusasaan mereka akan dakwaan yang sudah diantisipasi tersebut. Mereka tidak ingin menulis pembelaan yang heroik. Yang mereka lakukan selama persidangan adalah melucuti aspek-aspek legalitas, rasionalitas, dan keseriusan kasus tersebut. Mereka menjadikan sidang sebagai pesta *simulacra* dan mereka mencoba memberikan tanggapan yang sesuai.<sup>25</sup>

## Di balik Orde Baru, di balik *simulacra*

Ada beberapa hal penting yang bisa ditarik sebagai kesimpulan. Yang paling fundamental dari pemerintahan otoriter Orde Baru yang berumur panjang adalah kekerasan politik massal pada 1965-1966.

Tulisan ini bukan bermaksud menganalisis kekerasan pada 1965-1966 atau mengidentifikasi sebab-sebabnya melainkan ingin meneleksik beragam praktik teror, kebungkaman, mimpi buruk, kenangan, pengawasan ketat, kesalahpahaman, dan penerimaan pada periode 1990-an yang diakibatkan baik oleh trauma maupun tiruan kekerasan 1965. Praktik-praktik tersebut mewujudkan kekuasaan otoriter Orde Baru yang berlangsung lama.

Pembahasan sebelumnya memungkinkan kita membicarakan rezim jenis lain; rezim menyimpang yang mengklaim hubungan yang tak berubah antara penanda, petanda, dan konsep yang diwakilinya. Rezim ini bertanggung jawab atas anggapan yang berlaku saat ini tentang hubungan antara gambar palu dan arit, bekas Partai Komunis Indonesia, dan kebangkitan kembali komunisme masa kini. Rezim

<sup>25</sup> Dalam hal ini Nuku dan kelompok pendukungnya jauh lebih radikal dan subversif dari tim pengacara pembela dalam peradilan John Hinkley, seperti analisis Rosanne Kennedy (1992) yang sangat baik. Ia memperlihatkan tantangan besar dari *simulacra* terhadap prinsip-prinsip hukum fundamental dalam masyarakat modern.

yang sama juga menciptakan gambaran-gambaran lain dengan simbol dan isi yang berbeda.

Rezim diskursif itu juga yang menyulut kekerasan tahun 1965, atau kelahiran republik itu sendiri. Sebuah kondisi yang cukup unik bagi Indonesia atau rezim Orde Baru. Rezim ini bisa saja terus menghasilkan wacana dominan di Indonesia, pun lama setelah Orde Baru tidak berkuasa lagi, walaupun bukan tanpa perlawanan. Rezim diskursif yang demikian ini tak diragukan lagi berada dalam ketegangan terus-menerus dengan wacana lain yang saling bersaing, yang bersama-sama ikut menyumbang proses menjadi Indonesia seperti sekarang ini.<sup>26</sup> Dengan keadaan demikian, politik pencitraan menjadi hal penting.<sup>27</sup>

Berdasarkan teori *simulacra* Baudrillard, perlu ada pertanyaan yang lebih jauh: Apakah *simulacra* adalah koin ajaib yang menangkap apa saja yang lari dari modul ilmu sosial politik yang ada? Jawabannya adalah tidak. Apakah *simulacra* dapat memberikan akses yang lebih baik pada kebenaran mengenai relasi kekuasaan di sebuah masyarakat bekas koloni Eropa? Tidak. Apakah *simulacra* merupakan jenis-jenis virus pascamodernis yang mengancam akan membunuh ilmu sosial politik? Tidak.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Tidak lama setelah tahun 1965 yang menentukan, Orde Baru mengumumkan larangan penggunaan kata-kata Cina, karena dianggap berasosiasi dengan komunisme. Huruf-huruf Cina disamakan dengan bahan peledak, narkotika, dan pornografi dalam daftar barang yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia (Heryanto, 1998).

<sup>27</sup> Sejak pemilu 1987, ada larangan memasang gambar Presiden Sukarno. Ia adalah satu-satunya saingan berat bagi presiden yang berkuasa selama periode kampanye.

<sup>28</sup> Lihat pengakuan Baudrillard bahwa ia suka berpolemik, provokatif, suka melebih-lebihkan, dan bahwa ia tidak sepersisitis seperti yang ia tampilkan dalam karya-karyanya (Gane 1993: 132-133). Penilaian kritis namun simpatik oleh Bryan S. Turner (1993) terhadap kontribusi dan tantangan Baudrillard atas ilmu sosial juga pantas disebut di sini.

Daya tarik dan kekuatan kritik pascamodernis, seperti yang dipercaya Turner (1993), datang dari fakta bahwa ia dapat mengisi dengan baik wilayah yang tidak dapat dijelaskan oleh sosiologi arus utama dan Marxisme, yaitu budaya kontemporer. Konsep *simulacra* dapat menolong kita melihat dengan lebih jelas kekurangan besar dari ilmu sosial politik yang ada. Konsep tersebut melengkapi, menundukkan, mengubah, atau membuat simulasi kekurangan itu, tanpa menghilangkannya.

*Simulacra* bukan instrumen yang mudah dijangkau yang menyelamatkan atau berpura-pura menyelamatkan ilmu sosial politik dari masalah yang serius. Baudrillard tidak berdusta mengenai *simulacra*. Pengertian *simulacra* hanya membalik status tatanan dan hirarki antara gambaran dan kenyataan, antara tiruan dan asli, tanpa mengistimewakan yang satu dan menghilangkan yang lain.

Pernyataan Mbembe bahwa *the postcolony is the simulacral regime par excellence* (“wilayah bekas jajahan merupakan rezim *simulacral* yang paling sempurna”) (1992: 11) ada benarnya namun juga bermasalah. Jika pembahasan sebelumnya membenarkan pernyataan bahwa Orde Baru adalah rezim *simulacral*, pengertian “sempurna” di situ menyimpan persoalan. Pada satu sisi ia mengakui perbedaan-perbedaan penting dalam hal relasi kekuasaan dan kedudukan sejarah masyarakat pascakolonial dan masyarakat di kota besar. Di sisi lain, pengertian tersebut dapat dimaknai atau disalahartikan bahwa masyarakat pascakolonial bersifat homogen, eksotik, dan fundamental, dalam arti dapat disamakan dengan tradisi kolonial lama pada pandangan orientalisme yang vulgar.<sup>29</sup> Tradisi kolonial lama tersebut memiliki pengikut setia di antara otokrat Asia pada 1990-an.

Di titik ekstrim lainnya, Baudrillard terkenal karena menyebut

<sup>29</sup> Lihat rangkaian komentar kritis terhadap posisi Mbembe dalam *Public Culture* (1992: 47-122).

masyarakat Amerika Utara, terutama California, sebagai utopia *simulacral* yang sempurna. Pendapat mengenai Amerika yang *simulacral* khususnya dan *simulacra* pada umumnya memiliki titik awal yang sama, yaitu sampai sejauh mana jaringan media elektronik mengubah masyarakat dan keberadaan kita. Jika dilihat secara sempit dari sisi evolusioner ini, Orde Baru Indonesia tampaknya agak terbelakang dan tidak relevan. Tapi menyederhanakan efek simulasi hanya pada media elektronik tak lebih dari nostalgia dunia media non-elektrik masa lalu. Simulasi datang bersamaan dengan *invention of language* (“penemuan bahasa”) (MacCannel dan MacCannel, 1993: 131). Kalau tidak, mengapa Plato begitu sinis terhadap para penyair, yaitu pelaku *simulacra* yang hebat (Kennedy, 1992: 10, 28)?<sup>30</sup>

Meski cara pandang Mbembe dan Baudrillard tampaknya bertolak belakang, keduanya menciptakan kembali dikotomi lama dan berbahaya tentang hubungan negara-negara Timur-Barat, Utara-Selatan, negara maju-negara berkembang dengan sebutan yang berbeda. Dan lagi, kita dapat melihat bahaya pengkajian lebih jauh tentang perbedaan antara apa yang sering disebut di seminar dan makalah sebagai perlawanan kaum liberal-demokratis terhadap rezim otoriter.

Di dalam menjelaskan sifat khusus hubungan-hubungan kekuatan pascakolonial, Mbembe antara lain menekankan adanya unsur ketidakberdayaan pihak berkuasa dan obyek kekuasaan mereka (1992: 24). Begitu pula kira-kira pendapat Baudrillard mengenai masyarakat konsumen di dunia pascaindustri, pascakapitalis, dan pascaproduksi-massal: *Manipulation has never existed. The game is*

*played on both sides, with the same weapons, and who can say which is winning today* (“Manipulasi sesungguhnya tak pernah ada. Kedua belah pihak memainkan permainan yang sama, dengan senjata yang sama, dan tak ada yang bisa tahu siapa yang menang saat ini”) (1983a: 29). Tidaklah sulit menarik garis lurus antara pembahasan Baudrillard mengenai massa bisu atau *floating signs* (“tanda mengambang”) yang tak terkontrol dengan penduduk yang terdepolitisasi, dan hal ini secara resmi oleh pemerintah Orde Baru disebut sebagai “massa mengambang”.

Ada bahaya di balik pernyataan berlebihan dan miopia yang mengatakan rezim *simulacra* bersifat unik, khusus, dan hebat dalam satu tatanan masyarakat tertentu, baik otoriter maupun tidak. Tetapi, pernyataan sebaliknya—bahwa *simulacrum* dapat ditemui atau ada di mana-mana—juga sama bermasalahnya. Ini mengabaikan perbedaan, sering yang satu lebih penting daripada lainnya, antara komunitas, sub-komunitas, atau kelompok-kelompok yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi dilema ini adalah melalui kerja sama dengan beragam studi pada tataran mikro. Dengan begitu, kita dapat bertanya kepada Michel-Rolph Trouillot (1992: 79), situasi apa yang memungkinkan otoritarisme atau rezim *simulacra enhanced or weakened through public discourses and manifestations* (“diperkuat atau dilemahkan oleh wacana dan pernyataan publik”).

Pendekatan semacam itu menghindari asumsi-asumsi awal yang “menganggap sudah semestinya” yang membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya dengan cara yang sudah banyak ternodai esensialisme. Mempelajari fakta rumit secara mendetail akan membuat kita melihat keberadaan atau bahkan keunggulan rezim *simulacral* dalam masyarakat tertentu pada masa tertentu tidak akan menyebabkan masyarakat tersebut benar-benar *hyperreal*. Teror politik, pembunuhan, penyiksaan, atau pemenjaraan diharapkan bukan merupakan kenyataan.

Saat bulan-bulan yang penuh konfrontasi disertai kekerasan

<sup>30</sup> Lebih jauh mengenai pernyataan Baudrillard tentang masyarakat Barat kapitalis akhir yang juga dapat ditemukan dalam tingkat dan bentuk yang berbeda dalam banyak masyarakat lain dan sebelumnya, lihat kumpulan esai yang disunting oleh Rojek dan Turner (1993).

antara mahasiswa dan petugas keamanan, saat para mahasiswa menuntut presiden turun, tidak terdengar ada tuduhan komunisme. Ini menandai matinya hantu *simulacral* “ancaman komunis” yang disponsori Orde Baru, menjadikan tuduhan terhadap Sofjan Wanandi kasus terakhir dan kegagalan usaha rezim antikomunis yang sekarat untuk menunjukkan kekuasaannya. Namun, peristiwa ini juga bukan merupakan indikasi matinya momok tersebut. Orde Baru hanyalah pencipta dominan narasi penuh khayalan. Luka para korban perburuan antikomunis dan politik kiri yang populis masih ada dalam hidup keseharian masyarakat yang beragam. Orde Baru yang otoriter telah tumbang, tapi sejumlah tanda tanya dan kenangan yang menghantui seputar kekerasan 1965 masih terus hidup.

---

**Catatan:** Beberapa perspektif yang dipaparkan di sini berasal dari riset tesis doktoral saya di Monash University (1989-1994) di bawah bimbingan Joel S. Kahn dan Kenneth Young. Saya sangat berterima kasih kepada keduanya. Saya menyajikan makalah ini pada konferensi *Legacies of Authoritarianism: Cultural Production, Collective Trauma, and Global Justice* di University of Wisconsin (1998). Saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa individu lainnya atas komentar mereka yang bermutu dan mendalam, dan bantuan mereka dalam mengumpulkan materi yang relevan serta usulan tata bahasa: Michael Meehan, Keith Foulcher, Stanley Y. A. Prasetyo, Vedi R. Hadiz, Chua Beng Huat, James Scott, Otto Adi Yulianto, Budiawan, Donald Emmerson, Crawford Young, Thongchai Winichakul, Philip Kelly, dan Tessa Piper.

---

Penerjemah: Hera Diani

## Kepustakaan

- Anderson, Ben. 1990. *Language and Power*. New York: Cornell University Press.
- Baudrillard, Jean. 1983a. *The Shadow of Silent Majorities*. New York: Semiotext(e).
- \_\_\_\_\_. 1983b. *Simulations*, penerjemah Paul Fross, Paul Patton, dan Philip Beitchman. New York: Semiotext(e).
- Bernas. 1992a. “Diresmikan Presiden: Museum Pengkhianatan PKI Berisi 37 Diorama”, 2 Oktober:12.
- \_\_\_\_\_. 1992b. “Ditsospol Terus Usut Kasus Buku TK Bergambar Palu Arit”, 1 Desember:1, 11.
- \_\_\_\_\_. 1993a. “Menko Polkam: Waspadai Bahaya Laten Komunis”, 16 Februari: 8.
- \_\_\_\_\_. 1993b. “Disita Kodim 0721 Gantungan Kunci Mirip Lambang Partai Terlarang”, 2 Maret: 8.
- \_\_\_\_\_. 1994. “Waspadai Mainan Anak Bergambar Palu Arit”, 8 Februari): 8.
- Cadwell, Malcolm (ed.) 1975. *Ten Years' Military Terror in Indonesia*. Nottingham: Spokesman Books.
- Clifford, James. 1988. *The Predicament of Culture*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Coronil Fernando dan Julie Skurski. 1991. “Disremembering and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela”, dalam *Comparative Study of Society and History* 33 (2): 288-337.
- Cribb, Robert (ed.) 1990. *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Far Eastern Economic Review*. 1989. “Repression and Reprisal”, 22 Juni: 10-11.
- Fein, Helen. 1993. “Revolutionary and Antirevolutionary Genocides:

# Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

- A Comparassion of State Murders in Democratic Kampuchea, 1975 to 1979, and in Indonesia, 1965 to 1966”, dalam *Comparative Studies of Society and History* 35 (4): 796-823.
- Forum Keadilan*. 1994. “Panggung Peradilan Twenty One”, 3(1), 28 April: 110-111.
- \_\_\_\_\_. 1995. “Gaya Emas Tukang Bakso”, 4(11), 11 September: 29-30.
- \_\_\_\_\_. 1996a. “Mantan Tapol Menggugat”, 5(5), 17 Juni: 32.
- \_\_\_\_\_. 1996b. “Bulan Anti-PKI di Sekolahan”, 5(13), 7 Oktober: 28-29.
- \_\_\_\_\_. 1996c. “Soal Rumah Eks Tapol”, 5(13), 7 Oktober: 32.
- Foulcher, Keith. 1986. *Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian 'Institute of People's Culture' 1950-1965*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- \_\_\_\_\_. 1990. “Making History: Recent Indonesian Literature and the Events of the 1965”, dalam Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*, 101-119. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- \_\_\_\_\_. 1994. *The Manifesto Is Not Dead: Indonesian Literary Politics Thirty Years On*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Gane, Mike. 1993. *Baudrillard Live: Selected Interviews*. London: Routledge.
- Gatra. 1995. “Komunisme di Pakaian Anak”, 11 November: 35.
- Getal, G. 1994. “Komunisme Tetap Sebagai Ancaman”, tanggapan atas buku Alex Dinuth (ed.), *Sekitar Padnas, Bahaya Laten & Tapol G-30-S/PKI*, *Kompas*, 22 Maret: 16.
- Heryanto, Ariel. 1994. “Discourse and State-Terrorism: A Case of Political Trials in New Order Indonesia 1989-1990”, disertasi doktor, tidak diterbitkan, Monash University.
- \_\_\_\_\_. 1996a. “Indonesian Middle-Class Opposition in the 1990s”, dalam Garry Rodan (ed.), *Political Opposition in Industrialising Asia*, 241-271. London & New York: Routledge.
- \_\_\_\_\_. 1996b. “Pelecehan dan Kesewenang-wenangan Berbahasa: Plesetan dalam Kajian Bahasa dan Politik di Indonesia”, dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed.), *PELLBA 9: Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya Kesembilan*, 105-127. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 1996c. “Seakan-akan Pemilu”, dalam Ifdhal Kasim (ed.), *Mendemokratiskan Pemilu*, 79-109. Jakarta: ELSAM.
- \_\_\_\_\_. 1996d. “Shedding Light on Megawati”, dalam *Far Eastern Economic Review*, 17 Oktober: 32.
- \_\_\_\_\_. 1997. “Indonesia: Toward the Final Countdown?”, dalam Daljit Singh (ed.), *Southeast Asian Affairs 1997*, 107-126. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- \_\_\_\_\_. 1998. “Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesians in Public Culture”, dalam Joel Kahn (ed.), *Southeast Asian Identities: Culture and Politics of Representations in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*, 95-114. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Inside Indonesia*. 1994. “Insulting the President: Students on Trial”, 38 Maret: 11-12.
- Jakarta-Jakarta*. 1993. “Sutopo Yuwono”, 361, 5-11 Juni: 33.
- Jawa Pos*. 1992. “Diresmikan, Museum Pengkhianatan PKI”, 2 Oktober: 16.
- \_\_\_\_\_. 1993a. “Kasus Cover ‘Magis’ Atiek CB Dianggap Selesai”, 22 Oktober: 8.
- \_\_\_\_\_. 1993b. “Radio Yogyakarta Enggan Siarkan ‘Magis’”, 24 Oktober: 6.
- \_\_\_\_\_. 1994. “Dipantau, Peredaran Mainan Anak-anak Bergambar Palu Arit”, 7 Februari: 6.
- \_\_\_\_\_. 1995. “Pangdam Temukan Permen Palu Arit”, 27 Oktober: 8.

# Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

- \_\_\_\_\_. 1996. "Pangdam: Bukan PRD tapi PRT", 7 September: 17.
- Kedaulatan Rakyat*. 1993. "87 Buku Kiriman Colorado Mengandung Ajaran Komunisme", 1 Desember: 6.
- Kennedy, Rosanne. 1992. "Spectacular Evidence: Discourses of Subjectivity in the Trial of John Hinckley", dalam *Law and Critique*, 3(1): 3-28.
- Kompas*. 1992a. "Presiden Soeharto Resmikan Museum Pengkhianatan PKI", 2 Oktober: 12.
- \_\_\_\_\_. 1992b. "Monumen Sejarah di Desa Kresek", 5 Oktober: 13.
- \_\_\_\_\_. 1993a. "Kejaksaan Purbalingga Sita 17 Kaset Berlambang Palu Arit", 19 Oktober: 6.
- \_\_\_\_\_. 1993b. "Jaksa Agung: Kasus Atiek CB Sudah Selesai", 23 Oktober: 11.
- \_\_\_\_\_. 1994a. "Pentas Teater di Ruang Pengadilan", 17 Maret: 6.
- \_\_\_\_\_. 1994b. "Sebuah Panggung: Sebuah Olok-olok", 23 April: 9.
- \_\_\_\_\_. 1995. "Menulis 'PKI Madiun Bangkit', Delapan Tukang Baso Diperiksa", 24 Agustus: 15.
- \_\_\_\_\_. 1996. "Istri Pramudya Mengadu ke Komnas HAM", 13 Juni.
- Lane, Max. 1991. "Openness", *Political Discontent and Succession in Indonesia: Political Developments in Indonesia, 1989-1991*. Queensland: Griffith University.
- Lev, Daniel. 1992. "Writer's Colony: a Review of Toer, This Earth of Mankind", dalam *The Nation*, 3 Februari: 134-136.
- MacCannell, Dean dan Juliet Flower MacCannell. 1993. "Social Class in Post-modernity", dalam Chris Rojek dan Bryan S. Turner (ed.) *Forget Baudrillard?*, 124-145. London: Routledge.
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. "Dokumen untuk Merefleksikan Sikap", dalam *Kompas*, 14 Desember: 22.
- Mbembe, Achille. 1992. "The Banality of Power and the Aesthetics of Vulgarity in the Postcolony", penerjemah Janet Roitman, *Public Culture*, 4(2): 1-30.
- Motek. 1988. "New Witch Hunt Produces More Victims: Reviving the Communist Threat", dalam *Inside Indonesia*, 16 Oktober: 5-8.
- Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. 1968. *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia*. Jakarta: Pembimbing Massa.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Intermassa.
- Oei Tjoe Tat. 1995. *Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Sukarno*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Porter, Roy. 1993. "Baudrillard: History, Hysteria and Consumption", dalam Chris Rojek dan Bryan S. Turner (ed.) *Forget Baudrillard?*, 1-21. London: Routledge.
- Public Culture*. 1992. "Belly Up: More on the Postcolony" (kumpulan artikel yang Merespon tulisan Achille Mbembe, 5(1): 47-145.
- Reeve, David. 1990. "The Corporatist State: The Case of GOLKAR", dalam Arief Budiman (ed.) *State and Civil Society in Indonesia*, 151-176. Clayton: Centre of South-East Asian Studies, Monash University.
- Rochijat, Pipiet. 1993. *Baratayuda di Negeri Antah Berantah*. Jakarta: Humor.
- Rojek, Chris. 1993. "Baudrillard and Politics" dalam Chris Rojek dan Bryan S. Turner (ed.). *Forget Baudrillard?*, 107-123. London: Routledge.
- Rosidi, Ajip. 1985. *Anak Tanah Air*. Jakarta: Gramedia.
- Scott, James. 1985. *Weapons of The Weak*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sophiaan, Manai. 1994. *Kehormatan Bagi yang Berhak*. Jakarta: Yayasan Mencerahkan Kehidupan Bangsa.

# Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

- Southwood, Jule dan Patrick Flanagan. 1983. *Indonesia: Law, Propaganda, and Terror*. London: Zed Press.
- Suara Merdeka*. 1985. "Balon Berbentuk Palu Dilarang Beredar di Wilayah Pemalang", 18 Maret: 1.
- Surya*. 1995. "Ditemukan Nintendo Bergambar Palu Arit", 9 November: 5.
- TAPOL*. 1988. "Ex-prisoners as Social Pariah" 88, Agustus: 55.
- Tempo*. 1994. "Sepotong Pizza untuk Ibu Hakim", 5 Maret: 55.
- Trouillot, Michel-Rolph (1992. "The Vulgarity of Power", *Public Culture*, 5(1): 75-81.
- Turner, Bryan S. 1993. "Baudrillard for Sociologists", dalam Chris Rojek dan Bryan S. Turner (ed.) *Forget Baudrillard?*, 70-87. London: Routledge.
- Van de Kok, Jean dan Michael van Langenberg. 1990. "A Survey of Political Developments in Indonesia During the First Half of 1988: The PDI, Nahdlatul Ulama, The Presidency, Armed Forces, Communism", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 24, Winter: 145-170.
- Wijaya, Putu. 1983. *Nyali*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Williams, Raymond. 1980. *Problems in Materialism and Culture*. London: Verso.
- Yogya Post*. 1990a. "Tas "Palu Arit" Disita Polisi", 3 Desember: 1,11.
- \_\_\_\_\_. 1990b. "Uang Ribuan Tahun 1964 Dibeli Rp. 10 Juta", 8 Desember: 12.

## Tentang Penulis dan Penerjemah

**Ariel Heryanto** meraih gelar Ph. D. dari Monash University, Melbourne, dengan disertasi tentang *State Terrorism*. Mengajar di University of Melbourne sejak 1999, kini ia menjabat kepala Program Studi dan Bahasa Indonesia di universitas yang sama. Bersama Sumit Mandal ia mengedit kumpulan tulisan *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia* (2005). Buku sendiri yang telah terbit, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* (2006).

**David T. Hill** meraih gelar Ph. D. dari Monash University, Melbourne, dengan disertasi tentang Mochtar Lubis sebagai wartawan, sastrawan, dan aktor politik. Menjadi pengajar dan kepala Studi Indonesia di Murdoch University, guru besar ini menulis sejumlah buku, dua di antaranya ditulis bersama **Krishna Sen: Media, Culture and Society in Indonesia** (2000) dan *The Internet in Indonesia's New Democracy* (2005).

**Hera Diani** lulusan Jurusan Teknik Kimia, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Pernah enam tahun menjadi reporter di *Jakarta Post*, sekarang ia menjalani pekerjaan sebagai editor untuk majalah *Rollingstone* edisi Indonesia.